

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara demokratis, Indonesia memberikan keleluasaan kepada partai politik untuk menjalankan strateginya. Mereka memiliki "kebebasan" untuk memutuskan bagaimana mereka akan bergerak untuk mengambil kekuasaan. Guna mewujudkan hal itu, partai politik dituntut memenuhi syarat tertentu, yaitu melampaui ambang batas parlemen sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini merupakan syarat mutlak untuk dapat mengikuti pemilihan umum (pemilu). Jika syarat ini terpenuhi, maka mereka dapat berpartisipasi dalam penentuan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Julianda, 2018).

Pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilu dan sistem hukum di Indonesia ini merupakan perwujudan demokrasi. Penyelenggaraan pemilu tidak pernah terlepas dari warga negara, karena hal itu merupakan hak konstitusional warga negara baik untuk memilih maupun dipilih.

Partai politik merupakan institusi politik yang berperan penting dalam menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Sebagai aktor intermediary, partai politik memiliki fungsi untuk artikulasi dan agregasi kepentingan (Hasan, 2000). Berjalannya fungsi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti keinginan dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa demi kesejahteraan masyarakat dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara (Fales, 2018).

Partai politik adalah satu-satunya lembaga atau kelompok yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum politik dan berpartisipasi dalam pemilihan tersebut (Zaman, 2017). Oleh karena itu, partai politik seharusnya diawasi oleh negara. Dengan adanya partai politik, negara akan memperoleh warga negara yang mampu mengemban amanah kenegaraan, berkat proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai.

Seiring berjalannya waktu, munculnya partai politik baru semakin marak. Jika melihat kembali, empat partai baru muncul di Pemilu 2019: Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Namun, dari semua partai baru yang berpartisipasi dalam pemilu legislatif, tidak satu pun yang berhasil mencapai ambang batas parlemen, dan hasil suara keempat parpol ini sangat rendah. Setiap penyelenggaraan pemilu menghasilkan fenomena partai baru. Namun, tidak banyak partai yang dapat bertahan lama setelah pemilu berakhir.

Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 mengatur tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Undang-undang ini menetapkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu berdasarkan Pasal 1 yang menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga nasional yang bersifat tetap dan mandiri. Salah satu tahapan krusial dalam pemilihan umum adalah pencalonan anggota legislatif, yang memainkan peran penting dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun demikian, dalam praktiknya, banyak pemilih merasa bahwa aspirasi dan

kepentingan mereka tidak sepenuhnya terwakili oleh anggota parlemen yang terpilih, baik di tingkat nasional oleh DPR maupun di tingkat lokal oleh DPRD (Hendra, 2013).

Political marketing merujuk pada berbagai strategi yang digunakan dalam kampanye politik untuk memengaruhi keputusan pemilih. Strategi ini secara otomatis menciptakan serangkaian makna politik dalam benak pemilih, yang pada akhirnya menentukan pilihan mereka (Ria, 2015). Dalam situasi ini, calon legislatif dan calon presiden sangat terkait satu sama lain. Namun, situasi di Indonesia menunjukkan bahwa masyarakat cenderung bersikap apatis terhadap partai politik dan para calon yang diusung. Apatisme ini disebabkan oleh pandangan bahwa partai politik, calon legislatif, dan calon presiden tidak benar-benar berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sayangnya, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap situasi politik saat ini dapat menyebabkan krisis kepercayaan yang sangat parah. Hal ini berpotensi meningkatkan tingkat apatisme, yang terlihat dari rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu atau meningkatnya jumlah pemilih yang memilih untuk tidak memilih (golput). Golput ini sangat merugikan perjalanan demokrasi di Indonesia (Sanur, 2014).

Melalui strategi *political marketing*, partai politik dapat secara efektif mempromosikan ide dan gagasan politiknya kepada masyarakat untuk memperoleh dukungan. Dalam pemilu legislatif, *political marketing* dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi yang lebih luas tentang dinamika politik. Dengan demikian, kampanye politik memberi pemilih

keyakinan bahwa partai politik yang mereka pilih memiliki kualitas dan mampu menyuarakan aspirasi mereka (Firmanzah, 2012).

Legislatif merupakan salah satu dari tiga cabang kekuasaan dalam konsep trias politika yang dikemukakan oleh Montesquieu, dengan fungsi utama membuat undang-undang. Lembaga legislatif di Indonesia terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Calon anggota legislatif adalah orang yang dipilih langsung oleh masyarakat untuk mewakili rakyat dalam lembaga legislatif. Seseorang harus mengikuti prosedur rekrutmen untuk menjadi calon anggota legislatif. Penggunaan strategi pemasaran politik dalam pemilu legislatif memberikan manfaat bagi calon, partai politik, dan masyarakat dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan pemilu tersebut. Melalui pemasaran politik, kandidat dan partai politik berusaha meyakinkan pemilih bahwa mereka pantas dipilih dengan menawarkan produk politik yang sesuai dengan harapan pemilih. Produk politik ini meliputi atribut kandidat, visi dan misi partai politik, platform, program kerja, ideologi partai, dan sebagainya (Firmanzah, 2012).

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 di Kabupaten Ponorogo, sebanyak 45 orang berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo untuk periode 2019-2024, mewakili 11 partai politik yang berpartisipasi dalam pemilu tersebut. Komposisi perolehan kursi oleh masing-masing partai politik adalah sebagai berikut: Partai Nasdem memperoleh 10 kursi, diikuti oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 8 kursi, Partai Gerindra dengan 5 kursi, Partai Golkar dengan 4 kursi, Partai

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan 4 kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan 4 kursi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan 3 kursi, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan 1 kursi, Partai Demokrat dengan 5 kursi, dan Partai Hanura dengan 1 kursi (DPRD-Ponorogo, 2019).

Berdasarkan permasalahan utama yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang strategi politik yang diterapkan oleh Partai Gerindra dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian: Bagaimana strategi politik Partai Gerindra dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo?

#### **C. Tujuan**

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk memahami strategi politik Partai Gerindra dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Secara Akademis :

Dalam pengembangan ilmu pemerintahan untuk menuangkan pemikiran strategi politik partai Gerindra dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo .

##### 2. Secara Praktis :

Memberikan pendidikan politik, khususnya dengan meningkatkan pengetahuan tentang strategi politik Partai Gerindra dalam menghadapi pemilihan anggota legislatif tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo.

### 3. Bagi Pemerintah

Pemerintah dapat memahami strategi yang dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif untuk meraih kemenangan dalam pemilihan anggota legislatif.

## **E. Penegasan Istilah**

### 1. Strategi Politik

Strategi adalah seni menggunakan sumber daya dan keahlian organisasi untuk mencapai tujuan melalui interaksi yang efektif dengan lingkungan, memanfaatkan kondisi yang paling menguntungkan. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang membutuhkan pengambilan keputusan strategis, kata "strategi" berasal dari kata Yunani "*stratēgos*", yang menggambarkan serangkaian tindakan yang diambil oleh organisasi. Menurut Hunger, strategi adalah rumusan rencana komprehensif yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mencapai misi dan tujuannya.

### 2. Partai Politik

Partai politik adalah kumpulan aktivis politik yang berusaha mengambil alih pemerintahan dan mendapatkan dukungan publik. Mereka mencapai hal ini dengan bersaing dengan kelompok atau golongan lain yang berpendapat berbeda. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik, di mana partai berusaha mencari dan mengajak individu yang berbakat untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (political recruitment).

## **F. Landasan Teori**

### **1. Strategi Politik**

Menurut Salusu (2021), Strategi adalah seni memanfaatkan kemampuan dan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan memanfaatkan keadaan terbaik. "Stratēgos" adalah kata Yunani yang mengacu pada serangkaian tindakan yang diambil oleh organisasi untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, yang membutuhkan pengambilan keputusan strategis. Hunger mengatakan strategi adalah rencana lengkap untuk mencapai tujuan dan misi organisasi. Menurut Jack Trout dalam Sidarta, strategi mencakup berbagai cara untuk membuat perusahaan terlihat berbeda dari pesaingnya. Cara ini digunakan untuk membuat pelanggan dan calon pelanggan ingat tentang apa yang mereka tawarkan, membuat mereka bersedia menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya dikenal dalam kompetisi bisnis, konsep ini juga relevan dalam persaingan politik, karena kompetisi dalam konteks bisnis dapat dianggap sebagai komponen strategi politik.

Menurut Peter Schorder, strategi politik adalah teknik yang digunakan untuk mewujudkan cita-cita politik. Ini melibatkan pendekatan yang dilakukan oleh kontestan terhadap kelompok pemilih. Karena pesaing juga secara intens melakukan berbagai upaya untuk memenangkan persaingan politik, setiap kontestan harus mempertimbangkan strategi politik dengan cermat. Strategi politik biasanya adalah kampanye yang dimaksudkan untuk menanamkan makna politis dalam pikiran pemilih, yang kemudian diubah menjadi orientasi perilaku yang memengaruhi mereka untuk

memilih kontestan atau partai politik tertentu. Makna politis ini adalah hasil strategi politik yang signifikan karena menentukan pihak mana yang akan dipilih oleh pemilih (Tarmijin, 2017).

Tujuan utama dari metode politik adalah untuk menjamin bahwa masyarakat dapat memilih langsung calon anggota legislatif yang didukung oleh metode tersebut untuk menjadi anggota legislatif. Dengan demikian, strategi politik merupakan rencana sistematis yang dirancang untuk mencapai kemenangan dalam arena politik. Partai politik dapat berhasil dalam setiap kesempatan perebutan kekuasaan dengan menerapkan strategi politik. Berikut adalah tahapan strategi:

a. Perumusan

1. Menjelaskan bahwa penetapan visi misi perencanaan dan tujuan strategi adalah tahap pertama dari faktor yang mencakup analisis lingkungan intern maupun ekstern.
2. Perumusan strategi adalah proses membuat rencana untuk masa depan dengan tujuan membangun visi dan misi, merupaknan tujuan strategi, dan merancang strategi untuk mencapai tujuan tersebut.
3. Seorang pemimpin harus melakukan sejumlah tindakan untuk mencapai hal ini.
4. Tentukan lingkungan yang akan dimasuki oleh pemimpin dan tentukan tujuan untuk mencapai visi tersebut.
5. Menentukan tujuan dan target.

b. Pelaksanaan

1. Setelah tahap perumusan strategi selesai, tahap berikutnya yang sangat penting adalah pelaksanaannya.
2. Pelaksanaan strategi: Proses dimana strategi dan kebijaksanaan diterapkan melalui pembentukan struktur pengembangan program dan prosedur pelaksanaan program. Proses strategi yang paling sulit adalah pelaksanaan strategi, karena banyak faktor yang dapat mempengaruhinya di lapangan dan mungkin tidak sesuai dengan gagasan sebelumnya. Pemimpin yang teguh, bijaksana, dan paham akan situasi dan kondisi harus mendukung strategi untuk berhasil.

**2. Teori Sosial Capital**

Bourdieu (1986) pertama kali mendefinisikan sosial kapital sebagai sumber konsep aktual atau potensial, yang dikaitkan dengan kepemilikan jaringan atau, lebih tepatnya, hubungan timbal balik antar institusi yang dikenalnya. *Social capital* sama dengan sumber informasi dari perspektif bisnis. Gagasan, kesempatan bisnis, dana, kekuatan, dukungan emosional, kebaikan, kepercayaan, dan kolaborasi dari individu dan jaringan kerja bisnis (Baker, 2000). Cohen dan Prusak (2001) mengatakan sosial kapital adalah keinginan untuk terlibat secara aktif dalam hubungan yang mencakup kepercayaan, kerja sama yang menguntungkan, berbagi nilai, dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan dan masyarakat.

Menurut Supriono (2008) Modal sosial terdiri dari hubungan dan standar yang membentuk kualitas dan jumlah interaksi sosial di masyarakat. Mereka juga berfungsi sebagai perekat sosial yang

mempertahankan kesatuan anggota masyarakat. Namun, modal sosial didefinisikan oleh Coleman (1999) sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam berbagai kelompok dan organisasi.

Dalam kebanyakan kasus, kita dapat melihat nilai-nilai masyarakat melalui empat komponen berikut: (1) Penegakan sistem sosial di pedesaan yang produktif dan kompetitif yang tetap mempertahankan prinsip humanistik tanpa mengeksploitasi atau mengancam orang lain. (2) Penegakan sistem keadilan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia tanpa imperialisme atau mengabaikan kehidupan sosial. (3) Penegakan sistem solidaritas yang didasarkan pada hubungan saling percaya antara bagian masyarakat. (4) Memberikan kesempatan untuk mencapai tingkat keberlanjutan dan kemandirian kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang merupakan komponen penting dari eksistensi suatu komunitas.

### **3. Pengertian Partai Politik**

Fakta bahwa organisasi dapat menyatukan orang dengan pemikiran yang serupa, memungkinkan partisipasi politik. Secara etimologis, istilah "partai" berasal dari bahasa Latin "*partire*" yang berarti "membagi" atau "memilah," dan dapat disamakan melalui kata "*part*" yang berarti "bagian." Santori menggambarkan partai politik sebagai kelompok yang berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menempatkan calon-calon mereka di lembaga legislatif dan pemerintahan melalui proses pemilihan umum (Tarmijin, 2017)

Partai politik berfungsi sebagai perantara ide-ide dalam kerangka komunikasi dari atas ke bawah. Dalam kapasitas ini, partai politik berpartisipasi dalam diskusi dan penyebaran kebijakan dan rencana pemerintah. Selain itu, partai politik juga berfungsi sebagai media sosialisasi politik, di mana ideologi dan kesetiaan kepada partai dan negara ditanamkan. Fungsi sosialisasi politik yang efektif dapat meningkatkan identitas dan integrasi nasional. Sementara itu, menurut Miriam Budiardjo, partai politik berfungsi untuk mengurangi efek buruk dari perselisihan yang disebabkan oleh perbedaan agama, status sosial ekonomi, atau etnis.

Mark N. Hogapain mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang bertujuan untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik melalui praktik kekuasaan langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, dasar sosiologis dari setiap partai politik adalah adanya ideologi tertentu sebagai landasan perjuangan, yang ditujukan untuk mendapatkan, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Ware menyatakan dalam bukunya *Political Parties and Party Systems* bahwa partai politik adalah kelompok politik yang berusaha memperoleh pengaruh dalam suatu negara dengan tujuan untuk mengisi posisi strategis dalam pemerintahan. Selain itu, partai politik berusaha untuk menyatukan kepentingan masyarakat dan kemudian memanfaatkan partai untuk menyebarkan kepentingan tersebut. Undang-Undang No. 2 Tahun 2008, Pasal 12 juga mengatur fungsi partai politik di Indonesia (Cangara, 2009). Partai politik bertugas menjadi wadah untuk:

1. Memberikan pendidikan politik kepada anggota dan masyarakat umum sehingga mereka menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.
2. Menciptakan iklim yang menguntungkan dan memperkuat persatuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan aspirasi politik komunitas secara konstitusional dalam proses membuat dan menetapkan kebijakan Negara.
4. Warga Negara Indonesia berpartisipasi dalam politik.
5. Rekrutmen politik yang dilakukan secara demokratis dengan mempertimbangkan kesetaraan gender selama proses pengisian jabatan politik.

## **G. Definisi Operasional**

### **1. Strategi Politik**

Pengendalian strategi melibatkan dua elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi strategi. Elemen pertama adalah prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi, yang berfungsi untuk menyediakan data yang akurat dan relevan untuk pengambilan keputusan. Perlindungan informasi milik sendiri adalah topik kedua, yang bertujuan untuk melindungi kerahasiaan dan keamanan data dari pihak luar yang mungkin dapat memengaruhi atau mengganggu strategi yang digunakan.

## 2. Partai Politik

Partai politik diatur oleh Undang-Undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Menurut undang-undang tersebut, partai politik adalah organisasi berskala nasional yang dibentuk secara sukarela oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan kesamaan tujuan dan cita-cita. Tujuan utamanya adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## 3. *Social Capital*

Tata nilai yang terlihat dalam masyarakat umumnya dapat dianalisis melalui empat aspek berikut: (1) Penegakan sistem sosial di pedesaan yang memiliki daya saing tinggi dan produktif, namun tetap mengedepankan prinsip humanistik tanpa eksploitatif atau intimidatif terhadap anggota masyarakat. (2) Penegakan sistem keadilan yang berlandaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tanpa bersifat imperialistik atau mengabaikan kehidupan sosial. (3) Penegakan sistem solidaritas yang didasarkan pada hubungan saling percaya (*mutual trust*) di antara elemen-elemen masyarakat. (4) Pengembangan peluang untuk mencapai tingkat kemandirian dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang relatif tinggi, yang merupakan aspek penting dari eksistensi suatu komunitas.

## H. Metode Penelitian

### 1) Jenis Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, metode diperlukan, karena akuratnya penelitian bergantung pada metode yang digunakan dengan benar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menekankan proses dan makna. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang diteliti. Penelitian ini mengumpulkan data yang lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada angka. Penekanan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada proses dan makna dari perspektif subjek. Landasan teori digunakan sebagai panduan agar fokus penelitian sesuai dengan realitas di lapangan, serta untuk memberikan gambaran umum mengenai latar penelitian dan bahan pembahasan hasil penelitian (Noor, 2011).

### 2) Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah partai Gerindra Dapil 3 Kabupaten Ponorogo. Periode 2024 calon legislatif dari partai Gerindra di Kabupaten Ponorogo mendapat suara sebanyak 68.838 suara.

### 3) Teknik Penentuan Informan

Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih informan untuk penelitian ini.

### 4) Informan Penelitian

Individu yang menyediakan informasi mengenai situasi dan kondisi latar penelitian disebut informan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini harus memiliki pemahaman mendalam tentang konteks penelitian.

Dalam hal ini (Moleong, 2014), dikatakan bahwa informan, meskipun mereka hanya informan biasa, harus secara sukarela bergabung dengan tim penelitian. Peneliti menggunakan informan untuk mendapatkan informasi dari satu informan ke yang lain.

Informan penelitian ini termasuk:

- a. DPC Partai Gerindra Ponorogo
- b. PAC Partai Gerindra Ponorogo
- c. Calon Legislatif Pemilu 2024 Anik Suharto,S.Sos (Wakil Ketua DPRD Periode 2019 – 2024)

#### 5) Metode Pengumpulan Data

##### a) Observasi

Apabila sesuai dengan tujuan penelitian, observasi ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data. Itu harus direncanakan dan dicatat secara sistematis dan dapat dikontrol untuk keandalan (reliabilitas) dan kesahihannya (validitas).

##### b) Wawancara

Metode penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan informan melalui daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan masalah. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah dalam penelitian ini.

##### c) Dokumentasi

Proses dokumentasi merupakan suatu rangkaian yang dilakukan secara sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga pengelolaan data, yang menghasilkan sekumpulan dokumen. Tujuan melakukan

dokumentasi sendiri adalah untuk memperoleh dokumen yang diperlukan, yaitu keterangan dan bukti yang menunjukkan bahwa suatu tindakan telah dilakukan.

#### 6) Teknik Analisa Data

Data biasanya dikumpulkan sebelum, selama, dan setelah pekerjaan lapangan untuk analisis data. Menurut Nasution (1988), yang dikutip oleh Prof. Sugiyono,

“Analisis dimulai dengan merumuskan dan menjelaskan masalah. Ini dapat dilakukan sebelum penelitian dimulai atau sampai penulisan mendapatkan hasil penelitian.” (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang terdiri dari beberapa langkah, seperti:

##### a) Reduksi Data (Data Reduction)

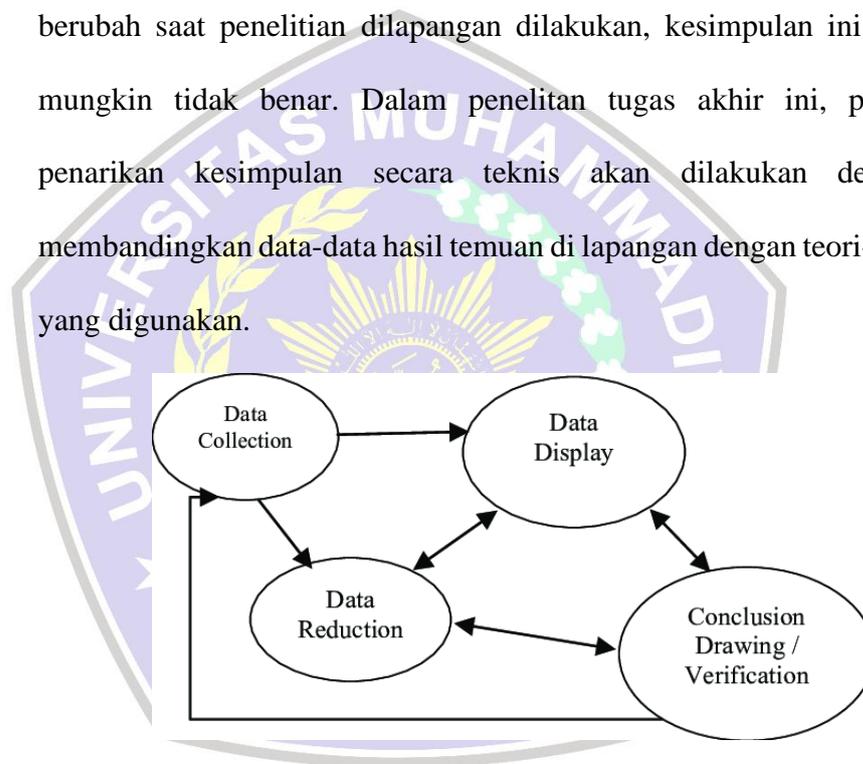
Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas di masa depan, dan proses pengumpulan data tambahan akan menjadi lebih mudah bagi peneliti. Dari aspek teknis, proses reduksi data dalam penelitian tugas akhir ini mencakup pembuatan rekaman hasil wawancara dan peninjauan dokumen yang telah dikumpulkan.

##### b) Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk teks naratif, tabel, gambar, dan grafik. Studi ini melakukan pemahaman serta memahami peran Partai Gerindra untuk memperoleh data yang diperlukan, baik dalam bentuk tabel, foto, maupun bagan.

c) Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)

Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah tugas yang dilakukan pada tahap ini. Kesimpulan penelitian kualitatif adalah temuan baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat sejak awal laporan tugas akhir. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif adalah sementara dan akan berubah saat penelitian dilapangan dilakukan, kesimpulan ini juga mungkin tidak benar. Dalam penelitan tugas akhir ini, proses penarikan kesimpulan secara teknis akan dilakukan dengan membandingkan data-data hasil temuan di lapangan dengan teori-teori yang digunakan.



Model Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber : (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, 2017)